

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

BAGIAN HUKUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak

Jl. Kyai Singkil No 7 – Demak - Jawa Tengah

Sumber: <i>Suara Merdeka</i>	Hari/Tgl: <i>Jumat / 1 Agustus 2015</i>	Hlm/Kol: <i>14 / 2</i>
Subjek:		Bidang:

Transparansi, Digitalisasi, dan Partisipasi Publik

DEMAK - Di tengah semangat membangun birokrasi yang bersih dan melayani, Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong inovasi berbasis teknologi. Salah satu strategi yang kini digencarkan adalah digitalisasi layanan publik, terutama dalam urusan administrasi kependudukan.

Langkah ini bukan semata mengikuti tren, melainkan bagian dari upaya nyata menciptakan sistem pelayanan yang lebih terbuka, transparan, dan bebas dari praktik pungli.

Beberapa layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) kini telah dialihkan ke sistem online. Warga bisa mengurus KTP, KK, akta kelahiran, hingga KIA (Kartu Identitas Anak) secara digital tanpa harus datang berkali-kali ke kantor.

"Digitalisasi ini bukan cuma soal efisiensi, tapi cara kita menutup celah manipulasi. Semakin terbuka sistemnya, semakin kecil peluang penyalahgunaan, dan kepercayaan masyarakat akan semakin kuat," jelas Kurniawan Arifendi Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

Tak hanya itu, Pemkab Demak juga membuka berbagai kanal pengaduan publik yang mudah diakses. Warga bisa menyampaikan keluhan atau saran melalui website resmi, media sosial, aplikasi mobile, bahkan layanan WhatsApp.

Bupati Demak, dr. Hj. Eisti'anah, S.E., menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan publik. Menurutnya, partisipasi warga adalah salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi.

"Warga bisa jadi kontrol sosial yang kuat. Mereka tahu mana pelayanan yang tulus dan mana yang setengah hati. Kita harus terbuka

menerima kritik dan masukan," tegas Bupati Eisti'anah.

Transformasi layanan publik ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah Samsul Maarif, warga Desa Gebang, yang baru saja mengurus e-KTP di kantor Dindukcapil.

"Dulu-dulu harus bolak-balik, kadang nunggu lama. Sekarang lebih gampang. Saya dilayani tanpa dimintai biaya tambahan. Petugasnya juga ramah dan menjelaskan semuanya dengan gamblang," ungkap Samsul.

Ia merasa perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius memperbaiki diri. Menurutnya, pelayanan publik harus bisa membuat masyarakat merasa aman, nyaman, dan dihargai.

"Harusnya memang begitu. Pemerintah itu melayani dengan sabar dan transparan. Kalau begini, kita benar-benar merasa seperti dilayani di negeri sendiri," tambahnya mantap.

Transformasi digital dan keterbukaan informasi menurut penuturan Bupati Eisti bukan hanya soal teknologi, tapi soal mindset. Pemkab Demak menyadari bahwa tantangan ke depan bukan sebatas membangun sistem, tapi juga menumbuhkan budaya melayani di kalangan aparatur sipil negara.

Dengan dukungan masyarakat sebagai pengawas aktif, serta teknologi sebagai alat bantu, Pemkab berharap pelayanan publik bisa menjadi lebih efisien, bersih, dan manusiawi.

"Kami ingin menciptakan suasana birokrasi yang ramah, mudah diakses, dan terbuka untuk evaluasi. Semua ini demi memberikan layanan terbaik bagi warga Demak," tutup Bupati Eisti'anah. (Hasan Hamid)